

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) termasuk ke dalam mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa di perguruan tinggi. PKn mengemban misi pengembangan karakter sebagaimana tercakup dalam standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 salah satu kompetensi yang diharapkan melalui PKn yaitu terbentuknya sikap demokratis yang berkeadaban berdasarkan nilai Pancasila. Sehingga PKn merupakan mata kuliah untuk membangun kepribadian mahasiswa menjadi warganegara yang baik dan cerdas. Pembelajaran PKn seharusnya tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitif mahasiswa tetapi menjadi proses internalisasi nilai kepada mahasiswa (Hakam & Nurdin, 2016). Agar pembelajaran PKn dapat mencapai tujuan, maka mutu pembelajaran harus diperhatikan (Winarno, 2020). Sebagaimana dikemukakan Branson mengenai tujuan pembelajaran PKn yaitu adanya partisipasi yang bertanggungjawab dalam kehidupan berpolitik dan masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun internasional (Hamidah, 2019). Sehingga pembelajaran PKn harus dibangun dan dirancang untuk mengembangkan potensi individu mahasiswa berakhlak mulia, cerdas dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Pembelajaran PKn berupaya untuk membina dan menggali potensi yang dimiliki oleh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor (Zulfikar & Dewi, 2021). Melalui pembelajaran PKn mahasiswa akan memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warganegara yang baik. Pembelajaran PKn yang diselenggarakan merupakan proses mendidik untuk berpikir kritis dan analitis. Melalui dialog kreatif akan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat sejalan dengan konsep *general education*. Manusia perlu memahami makna yang esensial bagi pembentukan kepribadian secara terpadu

dan menyeluruh (Phenix,1964). Keberhasilan pembelajaran PKn tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga dari sejauh mana mahasiswa mampu menginternalisasi sikap demokratis. Sikap demokratis dalam konteks Indonesia tidak sekadar berarti bebas berpendapat atau memilih, melainkan harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang beretika, berkeadaban, dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan semata-mata kehendak mayoritas.

Kenyataannya, pembentukan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa masih menjadi tantangan dalam proses pembelajaran PKn. Hal ini disebabkan karena pendekatan pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan berpusat pada dosen. Menurut Somantri (2001), PKn seharusnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan yang demokratis melalui pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Selama ini pembelajaran PKn belum secara maksimal menghasilkan kemampuan partisipatoris pada mahasiswa. Salah satu kemampuan partisipatoris yang seharusnya dimiliki mahasiswa yaitu pengelolaan konflik (Branson, 1998). Keadaan tersebut menekankan bahwa pembelajaran PKn harus mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kehidupan mahasiswa (Dooly, 2008). Pembelajaran yang dikembangkan dalam PKn harus berfokus pada pembelajaran demokratis yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk berekspresi secara bertanggungjawab (Katuneric, 2009). Hal tersebut sulit untuk terwujud jika kondisi pembelajaran PKn sekarang ini masih 1) Belum fokus pada penguatan sikap demokratis mahasiswa, 2) Materi pembelajaran PKn hanya sedikit memuat tentang nilai moral dan demokrasi, 3) Pembelajaran PKn seringkali dilakukan dengan metode ceramah, dan 4) Pembelajaran PKn dilakukan sangat teoritis. Pembelajaran PKn yang dilakukan secara konvensional, pendidik hanya dijadikan sebagai sumber belajar (Aeni, Prihatin, & Utanto, 2017). Hal tersebut menyebabkan mahasiswa sedikit memiliki pengalaman belajar dan kurang berinovasi serta kreativitas dalam belajar.

Akibatnya penguatan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa melalui pembelajaran PKn sulit untuk dilakukan. Hal tersebut akhirnya akan semakin memperpuruk sikap demokratis mahasiswa. Mahasiswa cenderung menjadi penerima pasif informasi tanpa keterlibatan aktif dalam proses berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan demokratis. Banyak mahasiswa kurang aktif dalam forum-forum yang mencerminkan kehidupan demokratis, seperti diskusi kelas, organisasi mahasiswa, atau kegiatan debat publik. Hasil penelitian menunjukkan hanya 30% mahasiswa yang aktif menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan (Santoso, 2018). Selain itu, tingkat toleransi antar mahasiswa terhadap perbedaan suku, agama, dan pandangan politik masih beragam. Survei yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa 40% mahasiswa menyatakan kurang nyaman berinteraksi dengan kelompok yang berbeda pandangan ideologis. Kultur akademik yang kompetitif dan pragmatis dalam pendidikan tinggi cenderung menumbuhkan nilai-nilai individualisme, yang berpotensi menurunkan sikap solidaritas dan partisipasi kolektif. Hal ini membuat sebagian mahasiswa kurang peduli terhadap persoalan bersama dan hak-hak orang lain.

Dalam pemberitaan di media sosial mengenai “Mahasiswa Sibuk Mengejar Karier, Politik Kampus UPI Cibiru Ditinggalkan?” menunjukkan fenomena kurangnya minat mahasiswa terlibat dalam demokrasi kampus melalui pemilihan ketua dan wakil ketua BEM. Organisasi yang seharusnya menjadi perwakilan mahasiswa di kampus kurang diminati karena mahasiswa lebih memilih karier sebagai *freelancer* atau pekerja lepas di bidang digital (Kompasiana.com, 6 Februari 2025). Hal ini bukan hanya sekedar persoalan mengenai hak mahasiswa tetapi boleh jadi mahasiswa belum siap dalam berdemokrasi di kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kampus mensyaratkan kemampuan kritis terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan

kampus, berkomunikasi yang baik dalam diskusi, dan masih banyak lagi yang semua itu dapat dilatih dalam pembelajaran di kelas.

Berita yang sama mengenai “Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia Berlanjut” menginformasikan bahwa menurut *The Economist Intelligence Unit* 2025, Indeks Demokrasi Indonesia memperoleh skor 6,44 di tahun 2024 dari skala tertinggi 10. Berdasarkan skor tersebut Indonesia berada dalam kategori demokrasi cacat. Istilah demokrasi cacat merujuk pada suatu bentuk sistem pemerintahan demokratis yang secara formal menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilu, kebebasan sipil, dan sistem hukum namun mengalami ketidakseriusan dalam pelaksanaannya. Demokrasi semacam ini tidak sepenuhnya otoriter, tetapi juga belum mencapai kualitas demokrasi yang matang atau ideal. Pemilu mungkin tetap dilaksanakan, namun sering kali diwarnai dengan kecurangan, manipulasi, atau tidak kompetitif secara adil. Selain itu, budaya politik dan partisipasi warganegara biasanya belum dilakukan secara optimal. Skor tersebut menunjukkan penurunan yang sebelumnya di tahun 2023 skor Indonesia memperoleh (6,53). Dari lima dimensi, skor terendah Indonesia pada ranah budaya politik (5,00) dan kebebasan sipil (5,29) (Sumber: Kompas, 6 Maret 2025). Berita tersebut mengindikasikan adanya budaya politik dan kebebasan masyarakat Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menguatkan kembali sikap demokratis mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa melalui pembelajaran PKn.

Budaya demokrasi merupakan sistem nilai, norma, dan perilaku yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, keterbukaan, keadilan, serta penghargaan terhadap perbedaan. Salah satu menurunnya budaya demokrasi dalam konteks Indonesia kerap ditandai dengan lunturnya etika dan moral dalam ruang publik. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki peran strategis dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai demokrasi. Menurut Almond dan Verba (1963) dalam bukunya *The Civic Culture*, keberlangsungan demokrasi sangat dipengaruhi oleh karakter

warganegara yang memiliki budaya partisipatif dan sikap demokratis, seperti toleransi, kepercayaan terhadap institusi politik, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Jika mahasiswa sebagai bagian dari elite intelektual tidak menunjukkan sikap demokratis tersebut, maka kontribusi mereka terhadap penguatan budaya demokrasi menjadi lemah, bahkan bisa memperparah keterpurukan demokrasi itu sendiri. Sementara itu Dewey (1916) menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi sarana pembentukan warganegara yang demokratis, yaitu individu yang mampu berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu bekerja sama dalam keragaman. Ketika pendidikan tinggi gagal menumbuhkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa, maka akan muncul kecenderungan eksklusivisme, intoleransi, dan pasifisme dalam kehidupan sosial-politik mahasiswa. Hal ini pada akhirnya berdampak pada keterpurukan budaya demokrasi, karena hilangnya daya kritis dan partisipasi aktif dari kelompok yang seharusnya menjadi agen perubahan.

Kondisi Pembelajaran PKn yang belum memaksimalkan dalam penguatan sikap demokratis mahasiswa akan semakin memperpuruk keadaan. Harus diakui bahwa selama ini pembelajaran PKn belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam proses pembelajaran PKn. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pipit Widiatmaka dalam penelitiannya yang berjudul “Kendala PKn dalam Membangun Karakter Peserta Didik di dalam Proses Pembelajaran” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurangnya kompetensi pendidik menjadi penyebab pembelajaran PKn hanya menekankan kemampuan kognitif (Widiatmaka, 2016). Penelitian ini mengisyaratkan betapa pentingnya peran dosen sebagai pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan mahasiswa. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Eta Yuni Lestari, dan Iqbal Arpannudin mengenai “Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka: Dinamika PKn” hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas pembelajaran PKn masih sangat perlu dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pendidik untuk memberikan keteladanan dan

melakukan inovasi model dalam pembelajaran PKn (Lestari & Arpanudin, 2020). Dengan demikian berbagai persoalan dalam pembelajaran PKn harus menjadi perhatian serius bagi dosen dan lembaga pengelola mata kuliah PKn. Hal tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi dosen untuk melakukan inovasi serta kreatif dalam mengembangkan model-model pembelajaran PKn.

Penelitian mengenai model-model pembelajaran PKn seringkali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal yang berbeda dalam penelitian ini yaitu menawarkan pengembangan model *Problem Based Learning* (PBL) untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa yang didukung oleh perangkat pembelajaran seperti RPS, modul, metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang didesain secara khusus untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa. Penelitian ini juga akan memberikan sumbangsih terhadap model pembelajaran PKn yang lebih demokratis dan sesuai dengan tuntutan zaman. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sekedar mengangkat persoalan pembelajaran PKn dan memberikan rekomendasi dalam penyelesain masalah.

Berbagai usaha secara kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh dosen untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dosen harus berkompetitif dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran (Bruggeman et al., 2010). Disisi lain, dosen memiliki tanggungjawab tidak sekedar mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa saja tetapi harus mampu mengembangkan kepribadiannya (Maftuh, 2009). Hal tersebut sejalan dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab” (Rensburg, 2006). Melalui undang-undang sistem pendidikan nasional mengisyaratkan bahwa pendidikan harus mencakup ranah afektif, kognitif dan psikomotor. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat membangun

kemampuan mahasiswa dalam keterampilan menyelesaikan masalah. Kemampuan menyelesaikan masalah pada mahasiswa sebagai parameter kematangan pribadi mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pembelajaran yang harus dilakukan berbasis masalah (*Problem Based Learning*).

Problem Based Learning (PBL) diturunkan dari teori bahwa belajar adalah proses dimana mahasiswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan (Gijsselaers, 1996). Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa berasal dari kehidupan sehari-hari. Mahasiswa menggunakan "pemicu" dari kasus masalah atau skenario untuk menentukan tujuan pembelajaran mereka sendiri (Wood, D. F., 2003). Model PBL bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk mahasiswa belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan (Duch, 1995). PBL akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara sistematis (Sumartini, 2018). Di sisi lain, PBL akan meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dalam menyikapi masalah yang dihadapi mahasiswa (Nurkhin, Kardoyo, Pramusinto, Setiyani, & Widhiastuti, 2020). Masalah yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diangkat dari kehidupan mahasiswa. Mahasiswa mengkritisi masalah yang ada dalam lingkungannya untuk diselesaikan (Rubini, Ardianto, Setyaningsih, & Sariningrum, 2019).

Sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa tidak akan begitu saja muncul pada diri individu melainkan harus dikembangkan melalui pembelajaran PKn. Hal tersebut selaras dengan pendapat Tocqueville, Alexis de, (1956) bahwa “setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional”. Hal ini tentunya bisa terwujud jika dilakukan pembinaan terhadap mahasiswa secara berkesinambungan melalui pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik *hardskills* maupun *softskills*. Dengan demikian akan terlahir mahasiswa yang memiliki kemampuan secara akademik juga mampu menghadirkan nilai pada perilakunya. Nilai merupakan keyakinan yang menjadi

dasar pemikiran seseorang sehingga memberikan motivasi untuk bertindak (Hakam & Nurdin, 2016). Sudah seharusnya proses pendidikan membawakan kematangan seseorang dalam berkepribadian. Sesungguhnya nilai terjadi pada wilayah psikologis kepribadian seseorang (Allport, 1954). Karakteristik warganegara muda yang demokratis dapat dikembangkan melalui pengetahuan wawasan kebangsaannya (Mellor dan Kennedy, 2007). Sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa yang dapat dibentuk di antaranya (1) menghargai hak-hak setiap individu, (2) menghormati hukum yang berlaku, dan (3) sukarela terlibat dalam kehidupan bermasyarakat (Lickona, 2012). Sikap demokratis Pancasila harus ditanamkan kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri dalam menyelesaikan berbagai persoalan diri dan bangsanya. Mahasiswa akan mencerna melalui akal dan menumbuhkan sikap rasionalitas dan tanggungjawab sehingga akan memperoleh penalaran moral secara optimal. Sikap demokratis merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain (Zubaedi, 2011). Sikap demokratis akan menghindarkan seseorang dari konflik (Hegre, Bernhard, & Teorell, 2020). Internalisasi sikap demokratis dapat dikembangkan pada kepribadian mahasiswa di era digital sekarang ini. Sikap demokratis sangat diperlukan di era digital dalam memanfaatkan teknologi (Hegre et al., 2020). Bentuk pengembangan sikap demokratis dengan cara pembiasaan dan keteladanan dalam musyawarah, bekerja sama, dan sikap menghargai serta menghormati hak orang lain (Rodiyana, 2018).

Dengan demikian, sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa dapat dikuatkan jika pembelajaran yang diperoleh di perguruan tinggi mendukungnya. Pembelajaran PKn sangat berpeluang untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa jika pembelajaran yang dilakukan dengan model dan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengembangan model PBL untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa pada PKn perlu untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian dalam disertasi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa ?
2. Bagaimana pengembangan model PBL untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ?
3. Bagaimana efektivitas model *Problem Based Learning* (PBL) untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini yaitu mengembangkan model PBL untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa dalam mata kuliah PKn.

1.3.2 Tujuan Khusus

Agar tujuan utama tercapai maka, secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PKn dalam menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa pada mata kuliah PKn.
2. Menyusun model PBL untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa dalam mata kuliah PKn.
3. Menganalisis efektivitas model PBL untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa dalam mata kuliah PKn.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Melalui hasil penelitian disertasi akan memberikan kontribusi keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan perkuliahan mata kuliah PKn.

1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Penelitian akan menghasilkan pengembangan model PBL untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa. Model ini diimplementasikan dalam pembelajaran PKn.

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap penelitian-penelitian mengenai model pembelajaran mata kuliah PKn.
- b. Memberikan motivasi pada dosen untuk terus mengembangkan model pembelajaran mata kuliah PKn sesuai dengan tuntutan zaman.

1.4.4 Manfaat dari segi pemecahan masalah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dalam upaya menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa dalam konteks perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek berikut:

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan mahasiswa program studi strata satu (S1) yang mengontrak mata kuliah PKn. Dosen pengampu mata kuliah tersebut juga dijadikan sebagai informan pendukung untuk mendapatkan data yang relevan mengenai proses pembelajaran.

2. Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini adalah implementasi model PBL serta penguatan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa selama proses pembelajaran PKn berlangsung.

3. Materi dan Kompetensi PKn

Fokus materi yang dikaji dalam mata kuliah PKn meliputi tema yang relevan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti: demokrasi di Indonesia. Selain itu, dilakukan kajian kasus melalui video dan narasi suatu peristiwa yang berhubungan dengan penguatan nilai-nilai demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa.

4. Sikap Demokratis yang Diteliti

Penelitian ini membatasi pada pengukuran dan menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa yang mencakup beberapa indikator, antara lain: (1) Menghargai hak-hak setiap mahasiswa, (2) Menghormati dan melaksanakan aturan yang telah disepakati di kelas, dan (3) Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

5. Lingkup Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada perkuliahan semester ganjil kepada mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PKn. Tempat penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Telkom.

6. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif (kombinasi) dengan metode RnD. Jenis dan pendekatan ini digunakan dalam merumuskan model PBL untuk menguatkan sikap demokratis Pancasila di kalangan mahasiswa.